BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 222 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis Satpol PP yang selanjutnya disebut Renstra Satpol PP adalah dokumen perencanaan Satpol PP untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Satpol PP yang selanjutnya disebut Renja Satpol PP adalah dokumen perencanaan Satpol PP untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satpol PP yang selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satpol PP serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Satpol PP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Satpol PP untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Satpol PP Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Satpol PP untuk melaksanakan rencana kerja Satpol PP;
(2) Renja Satpol PP Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Satpol PP tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Satpol PP;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Satpol PP dengan dokumen RKPD dan Renstra Satpol PP;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Satpol PP yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Satpol PP digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja Satpol PP selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA SATPOL PP

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Satpol PP Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Satpol PP tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA SATPOL PP

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Satpol PP menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Satpol PP meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Satpol PP dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Satpol PP.

Pasal 7

(1) Satpol PP membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Satpol PP.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Satpol PP disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Satpol PP tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala Satuan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satpol PP dan evaluasi hasil Renja Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Satpol PP terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Satpol PP.

(3) Kepala Satuan menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Satpol PP.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Satpol PP dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA SATPOL PP

Pasal 9

(1) Renja Satpol PP dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Satpol PP beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Satpol PP tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 222

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR .....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
SATPOL PP TAHUN 2026

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu parallel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025. Rencana Kerja PD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera)

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan Misi Ke-Lima: “Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum” sebagai berikut.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
8. Permen dagri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 122 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
24. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);
26. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 000.8/038/3692/BAPPERIDA Tanggal 20 Desember 2024 Tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antar wilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2024

Tabel 2.1 Evaluasi Program Tahun 2024

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET KINERJA	REALISASI	PRESENTASE
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD	78 point 100 persen		
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kesesuaian Indikator Kinerja dalam Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 persen	100 persen	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	100
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan	100 persen	100 persen	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	64 org/bln	64 org/bln	100
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen CALK	1 laporan	1 laporan	100

1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dalam Database	100 persen	100 persen	
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Asset	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Rata-rata Capaian SKP ASN PD yang Memiliki Nilai >=80%	100 persen	100 persen	
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai yang terpenuhi	2 Unit		-
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	1 Paket	2 Unit	100
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen P2KP ASN dan Non ASN PD	1 dokumen	1 Paket	100
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	64 orang	1 dokumen	100
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Operasional Perkantoran	100 persen	64 orang	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	1 Paket	100 persen	100
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	1 Paket	1 Paket	100
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli	1 Paket	1 Paket	100
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibeli	1 Paket	1 Paket	100
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	1 Paket	1 Paket	100
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bulan pembayaran bahan	2 dokumen	1 Paket	100

					Perundang-undangan	bacaan berlangganan			
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah peserta kunjungan tamu	1 Laporan	2 dokumen	100
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dan yang diselenggarakan	1 Laporan		100
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100 persen	1 Laporan	
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	1 Laporan	-
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibeli		100 persen	-
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dibeli	2 Unit	-	100
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	-		100
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya	-	2 Unit	100
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		-	100
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	100 persen	-	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air, dan listrik	1 Laporan		100
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa atau diadakan	1 Laporan	-	100
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	100 persen	100
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Asset yang Baik	100 persen	1 Laporan	

1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang beroperasi	21 unit	1 Laporan	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak beroperasi	35 unit	1 Laporan	100
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat bengkel yang terpelihara	2 unit	100 persen	100
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	-		100
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara		21 unit	100
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen	
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	20 Kasus	20 Kasus	100
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	20 Kasus	20 Kasus	100
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	100

1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	457 Orang	457 Orang	100
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelatihan, sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	5	2	2.01	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	2	2.01	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 unit	115 unit	100
1	5	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang harus Diselesaikan secara Tepat Waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	5	2	2.01	17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	1 Laporan	100
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 persen	100 persen	
1	5	2	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
1	5	2	2.02	12	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100

1	5	2	2.02	11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	100 persen	100 persen	
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1 Laporan	1 Laporan	100

Walaupun secara umum capaian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan berhasil namun masih ada kegiatan yang capaian kinerjanya masih di bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- Keterbatasan sumber daya anggota yang kompeten dari sisi jumlah maupun kualitas. Pola pikir aparat yang kurang kreatif dan inovatif sehingga tugas yang dijalankan selalu berdasarkan perintah namun bukan karena inisiatif dan kebutuhan. Penggunaan paradigma lama yang melekat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban yang selalu dipadupadankan sehingga akan selalu menggunakan pendekatan lama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Dalam konteks ini lebih mengutamakan penyelenggaraan ketertiban sehingga akan sulit mendukung pencapaian ke-4 yang berkaitan dengan tata kehidupan bermasyarakat (manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif).
- Masih Kurang Optimalnya Sarana Prasarana untuk Penegakan Perda dan Perkada
- Dukungan politis terhadap Satpol PP yang masih meletakan cara pandang organisasi ini hanya sebatas aktivitas rutin yang identik dengan hal-hal fisik belaka.

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026
Kabupaten Bandung

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja Renstra Satpol PP s/d Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Satpol PP Tahun 2025	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD	78,50 point 100 persen		78 point 100 persen		80.00	79,50 point 100 persen	79,50 point 100 persen	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kesesuaian Indikator Kinerja dalam Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat waktu	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100 persen
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 persen

1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	1	2.02	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
1	5	1	2.02	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	-	25 Data	25 Data	100 persen
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan	100 Persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 persen
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan		64 org/bln	64 org/bln	100	64 orang/ bulan	64 orang/ bulan	100 persen
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen CALK	1 Laporan		1 laporan	1 laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	18 Laporan		1 laporan	1 laporan	100	18 Laporan	18 Laporan	100 persen
1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dalam Database	100 Persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 persen
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 laporan	1 laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Asset	1 Laporan		1 laporan	1 laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Rata-rata Capaian SKP ASN PD yang Memiliki Nilai >=80%	100%		100 persen	100 persen	100 persen	100%	100%	100 persen

1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai yang terpenuhi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100 persen
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100 persen
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen P2KP ASN dan Non ASN PD	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	64 orang		64 orang	64 orang	100	64 orang	64 orang	100 persen
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Operasional Perkantoran	100%		100 persen	100 persen	100 persen	100%	100%	100 persen
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100 persen
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100 persen
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100 persen
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibeli	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100 persen
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100 persen
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan	Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100 persen
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah peserta kunjungan tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dan yang diselenggarakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100 Persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 unit		-	-	-	2 unit	2 unit	100 persen
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibeli	5 unit		-	-	-	5 unit	5 unit	100 persen
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dibeli	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100 persen	2 Unit	2 Unit	100 persen

1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1 Unit		-	-	-	1 Unit	1 Unit	100 persen
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit		-	-	-	1 Unit	1 Unit	100 persen
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Unit		-	-	-	5 Unit	5 Unit	100 persen
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	100 Persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air, dan listrik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa atau diadakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Asset yang Baik	100 Persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 persen
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang beroperasi	21 Unit		21 Unit	21 Unit	100	21 Unit	21 Unit	100 persen
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak beroperasi	35 Unit		35 Unit	35 Unit	100	35 Unit	35 Unit	100 persen
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebeul	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100 persen
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat bengkel yang terpelihara	20 Unit		-	-	-	20 Unit	20 Unit	100 persen
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100 persen
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 Unit		-	-	-	1 Unit	1 Unit	100 persen

1	5	1	2.09	11	Peliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		-	-	-	5 Unit	5 Unit	100 persen
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	20 Kasus		20 Kasus	20 Kasus	100	20 Kasus	20 Kasus	100 persen
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	20 Kasus		20 Kasus	20 Kasus	100	20 Kasus	20 Kasus	100 persen
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Bandung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen

1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelatihan, sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	457 Orang		457 Orang	457 Orang	100	457 Orang	457 Orang	100 persen
1	5	2	2.01	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
1	5	2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 Unit		115 Unit	115 Unit	100	115 Unit	115 Unit	100 persen
1	5	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang harus Diselesaikan secara Tepat Waktu	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
1	5	2	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-		-	-	-	350 orang	350 orang	100 persen
1	5	2	2.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	-		-	-	-	1'dokumen	1'dokumen	100 persen
1	5	2	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	-		-	-	-	30 orang	30 orang	100 persen

1	5	2	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	-		-	-	-	280 orang	280 orang	100 persen
1	5	2	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-		-	-	-	330 orang	330 orang	100 persen
1	5	2	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 Persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 persen
1	5	2	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 persen
1	5	2	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
1	5	2	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	-		-	-	-	1 unit	1 unit	100 persen
1	5	2	2.02	0007	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 persen
1	5	2	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	-		-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 persen
1	5	2	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	-		-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 persen

1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	2	2.02		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	100 Persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 persen
1	5	2	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	-		-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
1	5	2	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-		-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
1	5	2	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-		-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 persen
1	5	2	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-		-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 persen
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 persen

2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025 (Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021) Sedangkan Rencana Kerja untuk tahun 2025 terurai menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa untuk Program Kegiatan yang terbagi ke dalam 2 Program, 11 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2024.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Kabupaten Bandung "Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera)" dan misi nomor lima yaitu "Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum", pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung mendukung misi keempat Kabupaten Bandung. Untuk mencapai misi ke-lima tersebut, sesuai dengan Tugas yaitu :

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman; dan
3. Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat

Fungsi, yaitu :

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelengaraan ketertiban umumdan ketenraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewenangan yaitu :
7. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga negara masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
8. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

9. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaraan atas Perda dan / atau Perkada; dan
10. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2026 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2026, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

a. Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Bandung dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
b. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana pendukung penyelenggaraan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
c. Masih kurangnya jumlah anggota Linmas, berdasarkan Permendgari Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelengggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat pada Pasal 10 Ayat 4 untuk Satgas Linmas yang berada di Kecamatan minimal berjumlah 10 orang, berarti Kabupaten Bandung membutuhkan minimal 31 Kecamatan x 10 orang = 310 orang. Sedangkan untuk Desa/Kelurahan sesuai Pasal 13 dan 19, minimal mempunyai Linmas sebanyak 5 regu dan dalam 1 regu terdiri dari minimal 5 anggota dan 1 orang komandan regu, berarti Kabupaten Bandung membutuhkan minimal anggota Linmas sebanyak 280 Desa/Kelurahan x 6 orang x 5 regu = 8.400 orang. Jadi total minimal kebutuhan Linmas Kabupaten Bandung sesuai Permendagri tersebut adalah 8.400 orang + 310 orang = 8.710 orang.
d. Masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dimana hal – hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
b. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas Anggota Satpol PP.
c. Peningkatan kemampuan teknis Anggota satpol PP dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
d. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
e. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan dengan arah kebijakan:

a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non pemerintah.
d. Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan Good Governance dilaksanakan dengan arah kebijakan:
e. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
f. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Pelindungan masyarakat.
g. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan

Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kabupaten Bandung dengan arah kebijakan:

h. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.
i. Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya, antar SKPD dan masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24) dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten Bandung. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Satpol PP Kabupaten Bandung, Merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsure Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Sub Tugas yaitu :

- Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Satuan yang meliputi Kesekretariatan , Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen Perencanaan Satuan.
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), PEnyusunan indicator kinerja utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian kinerja, Proses Bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar pelayanan (SP) Satuan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan pertanggungjawaban akhir masa kerja Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaksanaan dan pelaporan kinerja lainnya.
- Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelnggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umu.
- Menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan system informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Satuan.
- Mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing.
- Memantau pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas
- Mengarahkan dan menegndalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Satuan
- Membina bawahan sesuai dengan ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan
- Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk ditanda tangani

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut
- Melaporkan pelaksanaan tugas Satuan secara Lisan, tertulis , berkala atau sesuai kebutuhan kepada pemimpin
- Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan program dan kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025, ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan salah satunya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adanya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pengganti Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga adanya perubahan tata cara pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya pada Satpol PP dari segi pendataan terhadap warga negara yang bakal terdampak dari penegakan Perda dan Perkada.

Terdapat 4 mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya meliputi:

1. Standar operasional prosedur Satpol PP;
2. Standar sarana prasarana Satpol PP;
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Keempat mutu pelayanan dasar tersebut akan dilaksanakan oleh Satpol PP pada kegiatan dan sub kegiatan berikut ini:

Tabel 2.2
Rincian Mutu Pelayanan Dasar dalam Kegiatan/Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026

NO	MUTU PELAYANAN DASAR	KODE REKENING/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	75,000,000

		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	50,000,000
2	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,720,032,000
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	250,000,000
3	Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	600,000,000
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	211,650,000
		Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	38,350,000
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	510,600,000
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	350,000,000
4	Standar Pelayanan yang terkena Dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	125,000,000
Jumlah			3,930,632,000

Berdasarkan mutu pelayanan dasar SPM pada Satpol PP di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk Standar Operasional Prosedur Satpol PP memiliki 82 SOP yang terdiri dari 15 SOP Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Trantibum dan 67 SOP Sekretariat.

Pada Sarana Prasarana Satpol PP kekurangan kendaraan operasional untuk melaksanakan patroli wilayah dalam penegakan Perda dan Perkada.

Dari segi peningkatan Anggota Satpol PP memiliki anggaran rutin bagi pengembangan kapasitas.

Adapun layanan terhadap warga yang terkena dampak gangguan Trantibum dari penegakan Perda dan Perkada, pada tahun 2026 Satpol PP dalam penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum tidak terjadinya kecelakaan orang maupun kerusakan barang sehingga target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang 0 (nol) ganti rugi tercapai.

Analisis kinerja pelayanan Satpol PP menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, dengan sasaran target sesuai Renstra Satpol PP dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bandung

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase Layanan terhadap warga negara yang terdampak perda dan perkada	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Sejak dibentuk pada tahun 1950 dengan terbitnya peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana dan terakhir di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Tugas, Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Serta Dengan Pembentukan Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu menjadi 4 bidang 3 seksi masing-masing bidangnya :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi pamong Praja dibantu oleh, yaitu:

1. Bidang Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
3. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
4. Bidang Perlindungan Masyarakat;

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung beserta Satlinmas bertugas untuk melaksanakan pengamanan dilaksanakan guna menciptakan rasa tentram, tertib dan merasa terlindunginya masyarakat dalam beraktifitas. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
- Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum,ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah; Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari.
- Masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum,
- Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

Ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung. Pemasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung terutama misi keempat. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sebelumnya *responsive* (tanggap darurat) menjadi *preventif*

(kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung
- Peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, melalui pelatihan dan bimtek.
- Tambahan Tenaga Pendukung Sumber Daya Manusia (Aparatur) dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung segera dapat direalisasikan. Apalagi telah terbentuknya unit pelaksanaan Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung.
- Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD yang bersinggungan dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung.
- Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan, secara cepat, tepat, tegas dan ikhlas. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan dan upaya lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Satpol PP.
- Masih terdapat program yang dilaksanakan oleh bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Merupakan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bandung. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka penjang tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Kabupaten Bandung karena masih menjadi bagian dalam

kebijakan Kesbangpol. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bandung untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026

KODE					Pagu Renja Tahun 2026				Hasil Analisis Kebutuhan					
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	5	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			74,169,530,399.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				74,169,530,399.00	
1	5	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	74,32 52,92	33,701,700,399.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bandung	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	74,32 52,92	33,701,700,399.00	
1	5	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80,95	260,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Nilai AKIP	80,95	260,000,000.00	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100,000,000.00	
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	15,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	15,000,000.00	
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15,000,000.00	

1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	15,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	15,000,000.00	
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	15,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	15,000,000.00	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30,000,000.00	
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000.00	
1	5	1	2.02	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	10,000,000.00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	10,000,000.00	
1	5	1	2.02	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	25 Data	10,000,000.00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	25 Data	10,000,000.00	
1	5	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	18,719,555,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	18,719,555,000.00	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	18,619,555,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	18,619,555,000.00	

1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35,000,000.00	
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	30,000,000.00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	30,000,000.00	
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	35,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	35,000,000.00	
1	5	1	2.03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100 Persen	30,000,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100 Persen	30,000,000.00	
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15,000,000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15,000,000.00	
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15,000,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15,000,000.00	
1	5	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100%	240,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100%	240,000,000.00	
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	15,000,000.00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	15,000,000.00	

1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100,000,000.00	
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25,000,000.00	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25,000,000.00	
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	100,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	100,000,000.00	
1	5	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	814,055,599.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	814,055,599.00	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00	
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	166,807,300.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	166,807,300.00	
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00	
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200,000,000.00	
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000,000.00	

1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	51,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	51,000,000.00	
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20,000,000.00	
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	286,248,299.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	286,248,299.00	
1	5	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	215,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	215,000,000.00	
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	50,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	50,000,000.00	
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	50,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	50,000,000.00	
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5,000,000.00	Pengadaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5,000,000.00	
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,000,000.00	
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	50,000,000.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	50,000,000.00	
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,000,000.00	

1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000.00	
1	5	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	12,778,089,800.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	12,778,089,800.00	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	85,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	85,000,000.00	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50,000,000.00	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12,643,089,800.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12,643,089,800.00	
1	5	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	85 Persen	645,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	85 Persen	645,000,000.00	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	150,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	150,000,000.00	

1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	350,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	350,000,000.00	
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5,000,000.00	
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5,000,000.00	
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000.00	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,000,000.00	
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,000,000.00	
					Jumlah 1			33,701,700,399.00	Jumlah 1				33,701,700,399.00	
1	5	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase PPNS Yang ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Penyelenggaraan Trantibum - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 persen	40,467,830,000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Bandung	- Persentase PPNS Yang ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Penyelenggaraan Trantibum - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 Persen	40,467,830,000	
1	5	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100 persen	38,731,476,000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100 persen	38,731,476,000	

1	5	2	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 dokumen	139,400,000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 dokumen	139,400,000	
1	5	2	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	21,528,884,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	21,528,884,000	
1	5	2	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	6,708,400,000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	6,708,400,000	
1	5	2	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	75,000,000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	75,000,000	

1	5	2	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	orang	211,650,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kab. Bandung	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	orang	211,650,000	
1	5	2	2.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	dokumen	50,000,000	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Kab. Bandung	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	dokumen	50,000,000	
1	5	2	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	orang	38,350,000	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	orang	38,350,000	
1	5	2	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	orang	510,600,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Kab. Bandung	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	orang	510,600,000	

1	5	2	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	orang	350,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Bandung	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	orang	350,000,000	
1	5	2	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan	6,524,160,000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan	6,524,160,000	
1	5	2	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 laporan	150,000,000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 laporan	150,000,000	

1	5	2	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	125,000,000	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	125,000,000	
1	5	2	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 unit	1,720,032,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 unit	1,720,032,000	
1	5	2	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	457 orang	600,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Bandung	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	457 orang	600,000,000	
1	5	2	2.02	0	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 persen	1,438,280,000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bandung	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 persen	1,438,280,000	
1	5	2	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	150,000,000	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	150,000,000	
1	5	2	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dokumen	50,000,000	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dokumen	50,000,000	

1	5	2	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	unit	250,000,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	unit	250,000,000	
1	5	2	2.02	0007	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	100,000,000	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	100,000,000	
1	5	2	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	laporan	38,280,000	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	laporan	38,280,000	
1	5	2	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	dokumen	50,000,000	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	dokumen	50,000,000	
1	5	2	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	200,000,000.00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	200,000,000.00	
1	5	2	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 laporan	300,000,000.00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 laporan	300,000,000.00	

1	5	2	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	300,000,000.00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	300,000,000.00	
1	5	2	2.03	0	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	100 persen	298,074,000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	100 persen	298,074,000	
1	5	2	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	dokumen	31,330,000	Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Bandung	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	dokumen	31,330,000	
1	5	2	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	dokumen	46,744,000	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	dokumen	46,744,000	
1	5	2	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	laporan	100,000,000	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	laporan	100,000,000	

1	5	2	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	laporan	50,000,000	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	laporan	50,000,000	
1	5	2	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	laporan	70,000,000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	laporan	70,000,000	
					Jumlah 2			40,467,830,000	Jumlah 2				40,467,830,000	
					TOTAL (jumlah 1 + 2)			74,169,530,399.00	TOTAL (jumlah 1 + 2)				74,169,530,399.00	

Pada Tabel T.C-31 diatas, terdapat beberapa penjelasan yaitu :

- Berdasarkan tabel diatas, Satpol PP mempunyai 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dengan 11 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan.
- Total Pagu Anggaran pada Renja Satpol PP Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 74.169.530.399,- yang terbagi pada Pagu Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 33.701.700.399,- dan Pagu pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp. 40.467.830.000,-

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memuat 14 prioritas dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung masuk dalam misi ke-lima yaitu “Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum”. Untuk mendukung pencapaian misi ke-lima Kabupaten Bandung serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, disusunlah tiga strategi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung yaitu:

1. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Pelindungan Masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja` Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung. Untuk itu, disusun tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2025-2029.

TABEL 3.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP
TAHUN 2025-2029

Visi	Misi		Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera)	M5	Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Untuk itu diperlukan tindakan nyata dalam bentuk progress kedepan agar sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.
- Memberdayakan Satpol PP dan PPNS menuju profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas.
- Menjalin kerjasama dengan aparat lainnya, serta berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan Polres, Kodim, Polsek dan Koramil di wilayah Kabupaten Bandung dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Meningkatkan koordinasidengan SKPD lainnya dalam hal penegakan disiplin aparatur.

Adapun hal-hal yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2026, seperti yang tertuang dalam Rencana

Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 untuk program dan kegiatan di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Berkurangnya potensi kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Bandung.
- Tersedianya daya dukung yang memungkinkan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
- Meningkatnya Aparatur Satpol PP dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang–undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.

  Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan,yaitu :
- Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
- Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
- Pemetaan kawasan rawan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Optimalisasi peran anggota Linmas.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung mencakup kepada tugas pokok dan fungsi Satpol PP itu sendiri yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan sasaran dan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Sebagai berikut:

TABEL 3.2

MATRIKS KETERKAITAN TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera).			
MISI 5 : Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	Peningkatan kapasita SDM Satpol PP terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peratura Kepala Daerah yang memuat sanksi
		Meningkatkan Sarana Prasarana Perda Perkada untukl memenuhi SPM (Sarana Pelayanan Minimal	Penyediaan sarana prasarana penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
		Meningkatkan Upaya Pre-emtif, Preventif, dan Represif atas Pelanggaran Perda/Perkada dan Peraturan Pelaksanaannya	Penguatan Peraturan tentang Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Meningkatkan SDM Satpol PP untuk memiliki Kompetensi PPNS	Penambahan jumlah SDM Satpol PP yang memiliki kompetensi PPNS
		Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pemetaan Kawasan tertib Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung pada tahun 2026 yaitu “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat”.

Adapun sasaran dalam Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2026 adalah “Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disajikan pada table 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET TAHUN						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	81,43	82,36	83,29	84,21	85,14	86,07	Agregat dari : 1 aspek penegakan perda 2. aspek pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. aspek pemeliharaan perlindungan masyarakat 4. aspek sumber daya manusia
		Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Jumlah pengendalian ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani)/(Jumlah pengendalian ketentraman dan ketertiban umum) x 100%

Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tercapainya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	

7	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	
8	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
10	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
11	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
12	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tercapainya pemenuhan dokumen pelaksanaan administrasi keuangan yang tepat waktu.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		
13	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	

14	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
15	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
16	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
17	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tercapainya Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD		
18	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
19	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
20	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tercapainya pemenuhan dokumen Administrasi Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu		
21	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

22	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
23	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
24	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
25	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tercapainya pemenuhan dokumen Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
26	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
27	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
28	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
29	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
30	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
31	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	

32	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
33	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
34	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tercapainya Pemenuhan Dokumen Pelayanan pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah		
35	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
36	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
37	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
38	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
39	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
40	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	

41	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tercapainya pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
42	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
43	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
44	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
45	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
46	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
47	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
48	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	
49	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	

50	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
51	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
52	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
53	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase PPNS Yang ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Penyelenggaraan Trantibum - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan			
54	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tercapainya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		

55	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	
56	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dann Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
57	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	
58	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	
59	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	

60	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Terbentuknya Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP			Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	
61	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Terlaksananya uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	
62	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	
63	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
64	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	

65	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	
66	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	
67	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	
68	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
69	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Penegakan Perda dan Perkada		

70	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
71	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
72	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	
73	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
74	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	
75	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	
76	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

77	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	
78	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
79	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tercapainya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		
80	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Pembentukan Sekretariat PPNS			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	
81	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
82	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Terlaksananya Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	

83	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	
84	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat	Tersedianya Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang oleh Satpol PP. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah- langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 3.5 Tabel Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1		Penguatan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	Peningkatan kapasita SDM Satpol PP terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peratura Kepala Daerah yang memuat sanksi	
2		Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penyediaan sarana prasarana penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	
3		Pemberian Perlindungan Kepada Masyarakat secara Profesional, Humanis dan Responsif	Pengutan Peraturan tentang Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
4.			Penambahan jumlah SDM Satpol PP yang memiliki kompetensi PPNS	

5.			Pemetaan Kawasan tertib Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera	

3.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan bahwa Satpol PP tidak terdapat Usulan Program dan kegiatan Masyarakat karena Satpol PP tidak melaksanakan Musrenbang

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1					
2					
3					

NIHIL

3.3 Program dan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan Masyarakat. Maka program dan kegiatan tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	5	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				74,169,530,399.00				71,731,425,889.00
1	5	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Kab. Bandung	74,32 52,92	33,701,700,399.00	DAU		75,32 53,02	33,853,025,889.00
1	5	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kab. Bandung	80,95	260,000,000.00	DAU		81,05	260,000,000.00
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	2 dokumen	100,000,000.00	DAU		2 dokumen	100,000,000.00
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15,000,000.00	DAU		1 dokumen	15,000,000.00
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15,000,000.00	DAU		1 dokumen	15,000,000.00
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15,000,000.00	DAU		1 dokumen	15,000,000.00
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15,000,000.00	DAU		1 dokumen	15,000,000.00

1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	30,000,000.00	DAU		1 Laporan	30,000,000.00
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	1 Laporan	50,000,000.00	DAU		1 Laporan	50,000,000.00
1	5	1	2.02	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	1 dokumen	10,000,000.00	DAU		1 dokumen	10,000,000.00
1	5	1	2.02	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung	25 Data	10,000,000.00	DAU		25 Data	10,000,000.00
1	5	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Kab. Bandung	100 Persen	18,719,555,000.00	DAU		100 Persen	18,719,555,000.00
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	64 orang/bulan	18,619,555,000.00	DAU PAD		64 orang/bulan	18,619,555,000.00
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	35,000,000.00	DAU		1 Laporan	35,000,000.00
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Bandung	1 dokumen	30,000,000.00	DAU		1 dokumen	30,000,000.00
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	3 Laporan	35,000,000.00	DAU		18 Laporan	35,000,000.00
1	5	1	2.03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Kab. Bandung	100 Persen	30,000,000.00	DAU		100 Persen	30,000,000.00

1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	15,000,000.00	DAU		1 Laporan	15,000,000.00
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	15,000,000.00	DAU		1 Laporan	15,000,000.00
1	5	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Kab. Bandung	100%	240,000,000.00	DAU		100%	240,000,000.00
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bandung	2 Unit	15,000,000.00	DAU		2 Unit	15,000,000.00
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung	1 Paket	100,000,000.00	DAU		1 Paket	100,000,000.00
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung	1 Dokumen	25,000,000.00	DAU		1 Dokumen	25,000,000.00
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	64 orang	100,000,000.00	DAU		64 orang	100,000,000.00
1	5	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandung	100%	814,055,599.00	DAU		100%	965,381,089.00
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	10,000,000.00	DAU		1 Paket	10,000,000.00
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	166,807,300.00	DAU		1 Paket	166,807,300.00
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	5,000,000.00	DAU		1 Paket	5,000,000.00
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	200,000,000.00	DAU		1 Paket	200,000,000.00
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	75,000,000.00	DAU		1 Paket	75,000,000.00
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 Dokumen	51,000,000.00	DAU		2 Dokumen	51,000,000.00

1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	1 Laporan	20,000,000.00	DAU		1 Laporan	20,000,000.00
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	286,248,299.00	DAU		1 Laporan	437,573,789.00
1	5	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	100 Persen	215,000,000.00	DAU		100 Persen	215,000,000.00
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 unit	50,000,000.00	DAU		2 unit	50,000,000.00
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bandung	5 unit	50,000,000.00	DAU		5 unit	50,000,000.00
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung	2 Unit	5,000,000.00	DAU		2 Unit	5,000,000.00
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	5,000,000.00	DAU		1 Unit	5,000,000.00
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Bandung	1 unit	50,000,000.00	DAU		1 Unit	50,000,000.00
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	5,000,000.00	DAU		1 Unit	5,000,000.00
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	5 Unit	50,000,000.00	DAU		1 Unit	50,000,000.00
1	5	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	100 Persen	12,778,089,800.00	DAU		100 Persen	12,778,089,800.00
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Laporan	85,000,000.00	DAU		1 Laporan	85,000,000.00
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Laporan	50,000,000.00	DAU		1 Laporan	50,000,000.00

1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Laporan	12,643,089,800.00	DAU		1 Laporan	12,643,089,800.00
1	5	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Kab. Bandung	100 Persen	645,000,000.00	DAU		100 Persen	645,000,000.00
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung	21 Unit	150,000,000.00	DAU		21 Unit	150,000,000.00
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung	35 Unit	350,000,000.00	DAU		35 Unit	350,000,000.00
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bandung	2 Unit	5,000,000.00	DAU		2 Unit	5,000,000.00
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung	20 Unit	5,000,000.00	DAU		20 Unit	5,000,000.00
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	100,000,000.00	DAU		1 Unit	100,000,000.00
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	25,000,000.00	DAU		1 Unit	25,000,000.00
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	5 Unit	10,000,000.00	DAU		1 Unit	10,000,000.00
					Jumlah 1				33,701,700,399.00				33,853,025,889.00
1	5	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase PPNS Yang ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Penyelenggaraan Trantibum - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Kab. Bandung	100 persen	40,467,830,000	DAU			37,878,400,000

1	5	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Bandung	100 persen	38,731,476,000	DAU		100 persen	35,983,400,000
1	5	2	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Bandung	1 dokumen	139,400,000	DAU		1 dokumen	150,000,000
1	5	2	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	1 dokumen	21,528,884,000	DAU		1 dokumen	20,000,000,000
1	5	2	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Bandung	1 dokumen	6,708,400,000	DAU		1 dokumen	6,708,400,000
1	5	2	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kab. Bandung	1 dokumen	75,000,000	DAU		1 dokumen	75,000,000
1	5	2	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Kab. Bandung	350 orang	211,650,000	DAU		orang	350,000,000
1	5	2	2.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Kab. Bandung	1'dokumen	50,000,000	DAU		dokumen	50,000,000

1	5	2	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Kab. Bandung	30 orang	38,350,000	DAU		orang	75,000,000
1	5	2	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Kab. Bandung	280 orang	510,600,000	DAU		orang	750,000,000
1	5	2	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Bandung	330 orang	350,000,000	DAU		orang	350,000,000
1	5	2	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Bandung	1 laporan	6,524,160,000	DAU		800 laporan	5,000,000,000
1	5	2	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Bandung	1 laporan	150,000,000	DAU		800 laporan	150,000,000
1	5	2	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Bandung	1 laporan	125,000,000	DAU		1 laporan	125,000,000
1	5	2	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Bandung	115 unit	1,720,032,000	DAU		115 unit	1,600,000,000

1	5	2	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bandung	457 orang	600,000,000	DAU		457 orang	600,000,000
1	5	2	2.02	0	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Bandung	100 persen	1,438,280,000	DAU		100 persen	1,475,000,000
1	5	2	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	150,000,000	DAU		laporan	150,000,000
1	5	2	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 dokumen	50,000,000	DAU		dokumen	50,000,000
1	5	2	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah		1 unit	250,000,000	DAU		unit	250,000,000
1	5	2	2.02	0007	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	100,000,000	DAU		laporan	100,000,000
1	5	2	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan		1 laporan	38,280,000	DAU		laporan	75,000,000
1	5	2	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		1 dokumen	50,000,000	DAU		dokumen	50,000,000
1	5	2	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	200,000,000.00	DAU		1 laporan	200,000,000.00
1	5	2	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		1 laporan	300,000,000.00	DAU		1 laporan	300,000,000.00

1	5	2	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	300,000,000.00	DAU		1 laporan	300,000,000.00
1	5	2	2.03	0	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		100 persen	298,074,000	DAU		100 persen	420,000,000
1	5	2	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS		1 dokumen	31,330,000	DAU		dokumen	100,000,000
1	5	2	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		1 dokumen	46,744,000	DAU		dokumen	100,000,000
1	5	2	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		1 laporan	100,000,000	DAU		laporan	100,000,000
1	5	2	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		1 laporan	50,000,000	DAU		laporan	50,000,000
1	5	2	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		1 laporan	70,000,000	DAU		laporan	70,000,000
									40,467,830,000				37,878,400,000
									74,169,530,399.00				71,731,425,889.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung adalah sebagai SKPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang –undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Sejalan dengan Misi Ke-lima Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan yang dirancang pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2026 terdiri dari :

Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung
Tahun 2026

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif		
1	5	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				74,169,530,399.00		
1	5	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Kab. Bandung	74,32 52,92	33,701,700,399.00	DAU	
1	5	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kab. Bandung	80,95	260,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	2 dokumen	100,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15,000,000.00	DAU	

1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	30,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	1 Laporan	50,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	1 dokumen	10,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung	25 Data	10,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Kab. Bandung	100 Persen	18,719,555,000.00	DAU	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	64 orang/bulan	18,619,555,000.00	DAU PAD	
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	35,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Bandung	1 dokumen	30,000,000.00	DAU	

1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	18 Laporan	35,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Kab. Bandung	100 Persen	30,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	15,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	15,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Kab. Bandung	100%	240,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bandung	2 Unit	15,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung	1 Paket	100,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung	1 Dokumen	25,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	64 orang	100,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandung	100%	814,055,599.00	DAU	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	10,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	166,807,300.00	DAU	

1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	5,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	200,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	75,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 Dokumen	51,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	1 Laporan	20,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	286,248,299.00	DAU	
1	5	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	100 Persen	215,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 unit	50,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bandung	5 unit	50,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung	2 Unit	5,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	5,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Bandung	1 unit	50,000,000.00	DAU	

1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	5,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	50,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	100 Persen	12,778,089,800.00	DAU	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Laporan	85,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Laporan	50,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Laporan	12,643,089,800.00	DAU	
1	5	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Kab. Bandung	100 Persen	645,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung	21 Unit	150,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung	35 Unit	350,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bandung	2 Unit	5,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung	20 Unit	5,000,000.00	DAU	

1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	100,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	25,000,000.00	DAU	
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	10,000,000.00	DAU	
					Jumlah 1				33,701,700,399.00		
1	5	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase PPNS Yang ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Penyelenggaraan Trantibum - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Kab. Bandung	100 persen	40,467,830,000	DAU	
1	5	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Bandung	100 persen	38,731,476,000	DAU	
1	5	2	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Bandung	1 dokumen	139,400,000	DAU	
1	5	2	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	1 dokumen	21,528,884,000	DAU	

1	5	2	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Bandung	1 dokumen	6,708,400,000	DAU	
1	5	2	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kab. Bandung	1 dokumen	75,000,000	DAU	
1	5	2	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Kab. Bandung	350 orang	211,650,000	DAU	
1	5	2	2.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Kab. Bandung	1'dokumen	50,000,000	DAU	
1	5	2	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Kab. Bandung	30 orang	38,350,000	DAU	
1	5	2	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Kab. Bandung	280 orang	510,600,000	DAU	
1	5	2	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Bandung	330 orang	350,000,000	DAU	

1	5	2	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Bandung	1 laporan	6,524,160,000	DAU	
1	5	2	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Bandung	1 laporan	150,000,000	DAU	
1	5	2	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Bandung	1 laporan	125,000,000	DAU	
1	5	2	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Bandung	115 unit	1,720,032,000	DAU	
1	5	2	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bandung	457 orang	600,000,000	DAU	
1	5	2	2.02	0	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Bandung	100 persen	1,438,280,000	DAU	
1	5	2	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	150,000,000	DAU	

1	5	2	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 dokumen	50,000,000	DAU	
1	5	2	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah		1 unit	250,000,000	DAU	
1	5	2	2.02	0007	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	100,000,000	DAU	
1	5	2	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan		1 laporan	38,280,000	DAU	
1	5	2	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		1 dokumen	50,000,000	DAU	
1	5	2	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	200,000,000.00	DAU	
1	5	2	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		1 laporan	300,000,000.00	DAU	
1	5	2	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	300,000,000.00	DAU	
1	5	2	2.03	0	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		100 persen	298,074,000	DAU	

1	5	2	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS		1 dokumen	31,330,000	DAU	
1	5	2	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		1 dokumen	46,744,000	DAU	
1	5	2	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		1 laporan	100,000,000	DAU	
1	5	2	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		1 laporan	50,000,000	DAU	
1	5	2	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		1 laporan	70,000,000	DAU	
									40,467,830,000		
									74,169,530,399.00		

Berdasarkan tabel diatas, Satpol PP mempunyai 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dengan 11 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan.

Total Pagu Anggaran pada Renja Satpol PP Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 74.169.530.399,- yang terbagi pada Pagu Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 33.701.700.399,- dan Pagu pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp.40.467.830.000,- .

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sejalan dengan Misi-5 Kabupaten Bandung yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 yaitu: “Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum”. Satpol PP telah menetapkan isu-isu strategis yang diangkat dari hasil evaluasi kinerja pelayanan Satpol PP selama periode Renja sebelumnya yang kemudian menjadi priorita dalam pengembangan kinerja pelayanan Satpol PP dimasa yang akan datang. Namun demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan misi Kabupaten Bandung tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah serta perangkat daerah lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja. Keberhasilan pencapaian Renja ini akan dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, tanggung jawab, kerja tuntasdan konsisten untuk mewujudkan peningkatan kinerja Satpol PP di masa ini dan dimasa yang akan datang.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2026 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja pada tahun tersebut, sehingga rencana kerja yang dibuat harus sesuai dengan rencana yang tertuang dalam rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung 2025-2029. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Hasil evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama periode sebelumnya menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam peningkatan kompetensi dan kualitas layanan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan Masyarakat
2. Kapasitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kurang nya Personil PPNS Satpol PP
4. Sarana dan prasarana trantibum belum memadai

Oleh karena itu, strategi yang terencana dan pelaksanaan yang konsisten dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat diperlukan. Melalui Renja ini, diharapkan Satpol PP mampu meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Masyarakat Kabupaten Bandung.

5.2 Kaidah Pelaksanaan Penyusunan Renja

Penyusunan Renja Satpol PP mengikuti kaidah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

Berikut adalah prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja:

1. Keterpaduan
   Renja harus terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah lainnya. Hal ini memastikan bahwa semua program dan kegiatan saling mendukung dalam mencapai visi dan misi daerah.
2. Partisipatif
   Proses penyusunan melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk ASN, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan cara ini, masukan yang konstruktif dapat diperoleh untuk memperkaya isi Renja.
3. Transparansi
   Semua tahapan dalam penyusunan Renja dilakukan secara terbuka, sehingga informasi dapat diakses oleh publik. Ini merupakan bentuk akuntabilitas Satpol PP kepada masyarakat.
4. Berbasis Data
   Penyusunan Renja harus didasarkan pada analisis data yang akurat dan relevan. Penggunaan data yang valid akan membantu dalam merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan.
5. Kesesuaian dengan Regulasi Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan daerah dan nasional, menjadi dasar dalam penyusunan dokumen ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Fleksibilitas

   Renja harus dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kemampuan untuk beradaptasi akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renja Satpol PP berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi beberapa kegiatan penting:

5.3.1 Pengendalian

1. Monitoring Berkala

   Monitoring Berkala Pelaksanaan program dan kegiatan akan dimonitor secara berkala oleh tim yang ditunjuk. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Laporan Berkala

   Penyusunan laporan kinerja akan dilakukan secara berkala untuk menggambarkan hasil pelaksanaan Renja dan mencakup pencapaian indikator kinerja. Laporan ini akan disampaikan kepada pimpinan dan stakeholder terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Rapat Koordinasi

   Mengadakan rapat koordinasi secara rutin untuk membahas perkembangan pelaksanaan Renja, mengevaluasi capaian dan merumuskan solusi atas hambatan yang dihadapi. Rapat ini juga sebagai ajang untuk berbagi informasi dan pengalaman antar bidang.

5.3.2 Evaluasi

1. Evaluasi Tahunan

   Melakukan evaluasi tahunan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap pencapaian sasaran dan dampak terhadap pelayanan publik.

2. Rekomendasi Perbaikan

   Berdasarkan hasil evaluasi, akan disusun rekomendasi untuk perbaikan dan penyesuaian strategi di tahun-tahun berikutnya. Rekomendasi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja tahunan.

3. Pemberian Umpan Balik

   Memberikan umpan balik kepada seluruh Anggota Satpol PP dan stakeholder terkait mengenai hasil evaluasi dan pencapaian kinerja. Umpan balik ini penting untuk meningkatkan motivasi dan komitmen dalam melaksanakan tugas.

5.3.3 Tindak Lanjut

1. Rapat Koordinasi

   Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk membahas hasil evaluasi dan menentukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. Rapat ini juga akan membahas langkah- langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

2. Penyusunan Rencana Aksi

   Menyusun rencana aksi untuk mengimplementasikan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari hasil evaluasi. Rencana aksi ini mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh masing-masing bidang untuk meningkatkan kinerja.

3. Monitoring Tindak Lanjut

   Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun untuk memastikan bahwa semua rekomendasi perbaikan diterapkan dengan baik dan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja Satpol PP.

Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dan melaksanakan pengendalian serta evaluasi secara berkelanjutan, diharapkan Satpol PP Kabupaten Bandung dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

ttd

UWAIS QORNI

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Hal

BAB II

Tabel 2.1 Evaluasi Program Tahun 2024 16

Tabel TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra 2021-2026 22

Tabel 2.2 Rincian Mutu Rincian Mutu Pelayanan Dasar dalam Kegiatan/Sub Kegiatan 34

Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 35

Tabel T-C 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 38

BAB III

Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satpol PP Tahun 2025-2029 54

Tabel 3.2 Matriks Keterkaitan Tujuan Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan 56

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan..... 57

Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan 58

Tabel 3.5 Tabel Arah Kebijakan Renstra PD 71

Tabel TC 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 72

Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 73

BAB IV

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 83